

## JUDUL: PENGGUNAAN TINDAKAN RETALIASI DALAM SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Nama: Gita Venolita Valentina Gea  
Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum/Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

### ABSTRAK

Retaliasi adalah tindakan balasan oleh suatu negara terhadap negara yang menyebabkan kerugian terhadapnya. Adapun retaliasi dalam lingkup hukum internasional dikenal sebagai cara penyelesaian sengketa dengan cara paksaan. Diamanatkan oleh Piagam PBB bahwa setiap penyelesaian sengketa internasional hendaknya menghindari cara paksaan, namun tidak secara mutlak melarang penggunaannya. Dalam sengketa perdagangan internasional yang berada di bawah WTO, secara implisit retaliasi juga dikenal dan dapat diterapkan oleh negara anggota WTO. Retaliasi ditemukan dalam berbagai bentuk mulai dari *trade remedies* hingga penangguhan konsesi. Akan tetapi, penggunaan retaliasi masih menuai perdebatan khususnya mengenai dampak kerugian yang semakin besar dan dapat mendistorsi perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan antara penggunaan retaliasi terhadap prinsip-prinsip perdagangan internasional serta sejauh mana pengaturannya dan pengawasan oleh organ terkait yakni DSB WTO. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode yuridis-normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa retaliasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun *trade remedies* justru seringkali memicu sengketa perdagangan internasional, namun retaliasi dalam bentuk penangguhan konsesi tetap diperlukan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional sebagai upaya mendorong kepatuhan dan pelaksanaan terhadap rekomendasi DSB WTO. Namun untuk menjaga agar penggunaan retaliasi tidak membawa dampak yang semakin merugikan, perlu pengaturan yang lebih terperinci dan spesifik mengenai penangguhan konsesi. Adapun peran DSB WTO saat ini belum mencapai pengawasan terhadap retaliasi itu sendiri, oleh karenanya diperlukan pembentukan badan di bawah DSB WTO yang khusus mengotorisasi dan mengawasi setiap tindakan retaliasi yang dilakukan oleh negara anggota WTO dalam konteks sengketa perdagangan internasional.

Kata kunci: retaliasi, perdagangan internasional, WTO

TITLE: PENGGUNAAN TINDAKAN RETALIASI DALAM SENGKETA  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Name: Gita Venolita Valentina Gea  
Dicipline/Study Programme: Ilmu Hukum/Magister Ilmu Hukum  
Contributor: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

ABSTRACT

*Retaliation is an act of revenge by a country against another country that caused damages towards it. In the scope of international law, retaliation is known as a method of resolving disputes by means of coercion. It is mandated by the UN Charter that any international dispute resolution should avoid coercion, but does not absolutely prohibit its use. In international trade disputes under the WTO, retaliation implicitly also known and is allowed to be applied by WTO state members. Retaliation is found in some forms ranging from trade remedies to suspension of concessions. However, the use of retaliation is still debatable, especially regarding the impact of greater losses and the distortion towards international trade. This study aims to determine the harmony between the use of retaliation against the principles of international trade and the extent of its regulation and supervision by the relevant organ, namely the WTO DSB. Based on the research conducted using the juridical-normative method, the results of the study show that retaliation does not conflict with the principles of international trade as long as it is carried out in accordance with the stipulated provisions. Although trade remedies often trigger international trade disputes, retaliation in the form of suspension of concessions is still needed in the resolution of international trade disputes as an effort to encourage compliance and implementation of the WTO DSB recommendations. However, to ensure that the use of retaliation does not have an increasingly detrimental impact, more detailed and specific arrangements are needed regarding the suspension of concessions. The role of the WTO DSB currently has not reached the supervision of retaliation itself, therefore it is necessary to establish a body under the WTO DSB that specifically authorizes and supervises every act of retaliation carried out by WTO member countries in the context of international trade disputes.*

Keywords: *retaliation, international trade, WTO*